

Potensi Dampak Kebijakan Sekolah Rakyat Terhadap Kesenjangan Sosial Dalam Pendidikan di Kota Surabaya (Perspektif SDGs)

Lakxit Gustav Nur Aziz¹, Achmad Kamal Syah Lilah², Indah Prabawati³, Firre An Suprpto⁴

¹²³⁴Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

Email: 25040674113@mhs.unesa.ac.id¹, 25040674033@mhs.unesa.ac.id²,
indahprabawati@unesa.ac.id³, firresuprpto@unesa.ac.id⁴

Article History:

Received: 25 Juni 2026

Revised: 10 Juli 2026

Accepted: 21 Juli 2026

Keywords: Sekolah Rakyat,
Kebijakan Pendidikan, SDGs.

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan Sekolah Rakyat terhadap kesenjangan sosial dalam sistem pendidikan dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk mengkaji berbagai sumber akademik terkait ketimpangan pendidikan dan kebijakan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi, historis, dan kelembagaan, serta belum sepenuhnya teratasi melalui kebijakan pemerataan yang ada. Program Sekolah Rakyat hadir sebagai kebijakan pendidikan untuk memperluas akses bagi kelompok masyarakat kurang mampu. Namun, kebijakan ini memiliki sifat ambivalen, karena selain meningkatkan partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah, juga berpotensi menciptakan segregasi sosial, memperkuat stigma, dan membatasi interaksi lintas kelas sosial. Selain itu, aspek tata kelola kebijakan menunjukkan adanya potensi fragmentasi dalam sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang inklusif, terintegrasi, dan berorientasi pada pemerataan kualitas pendidikan.

PENDAHULUAN

Pencapaian agenda Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 menempatkan pendidikan sebagai salah satu instrumen utama dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Secara khusus, tujuan ke-4 menekankan pentingnya pendidikan berkualitas yang inklusif, sedangkan tujuan ke-10 menekankan pengurangan kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat. Dalam perspektif pembangunan, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana peningkatan kapasitas individu, tetapi juga sebagai mekanisme mobilitas sosial yang dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi (Blanden et al., 2022). Oleh karena itu, sistem pendidikan yang adil dan merata menjadi prasyarat penting bagi terciptanya keadilan sosial dalam masyarakat. Namun demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa sistem pendidikan masih menghadapi tantangan ketimpangan akses dan kualitas. Ketimpangan pendidikan berkaitan erat

dengan latar belakang sosial ekonomi siswa, di mana kelompok masyarakat dengan status ekonomi rendah cenderung memiliki akses yang lebih terbatas terhadap pendidikan berkualitas. Selain itu, pemisahan sekolah berdasarkan latar belakang sosial ekonomi juga dapat memperkuat kesenjangan pendidikan. Pemisahan siswa dari kelompok kaya dan miskin dalam institusi pendidikan yang berbeda berpotensi menciptakan ketimpangan dalam kualitas pembelajaran, sumber daya pendidikan, serta kesempatan pengembangan diri siswa (Gutiérrez et al., 2020).

Dalam konteks Indonesia, pemerintah telah berupaya mengurangi kesenjangan pendidikan melalui berbagai kebijakan afirmatif, salah satunya melalui penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru. Kebijakan ini bertujuan untuk mendistribusikan akses pendidikan secara lebih merata dan mengurangi stigma sekolah favorit yang selama ini memperkuat ketimpangan pendidikan. Meskipun demikian, implementasi kebijakan pemerataan pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam memastikan bahwa kelompok masyarakat miskin memperoleh akses pendidikan yang setara dengan kelompok sosial lainnya. Sebagai bagian dari upaya nasional untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat kurang mampu, pemerintah Indonesia mengembangkan program Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah yang memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan formal. Program ini merupakan bentuk kebijakan afirmatif dalam sistem pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kesempatan belajar bagi kelompok marginal serta mengurangi angka putus sekolah.

Meskipun memiliki tujuan yang progresif dalam memperluas akses pendidikan, pembentukan institusi pendidikan yang secara khusus menampung kelompok sosial ekonomi tertentu juga menimbulkan sejumlah perdebatan dalam kajian kebijakan pendidikan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemisahan siswa berdasarkan latar belakang ekonomi dapat menciptakan segregasi sosial dalam sistem pendidikan. Lingkungan pendidikan yang homogen secara sosial berpotensi membatasi interaksi lintas kelas sosial, yang pada akhirnya dapat memperkuat kesenjangan sosial dalam jangka panjang (Van de Werfhorst & Mijs, 2019). Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas ketimpangan pendidikan dan dampak kebijakan pemerataan akses pendidikan secara umum. Namun demikian, kajian yang secara khusus menganalisis potensi segregasi sosial akibat kebijakan pendidikan berbasis institusi terpisah seperti Sekolah Rakyat, terutama dalam konteks implementasinya di kota besar seperti Surabaya, masih relatif terbatas. Padahal, pemahaman mengenai dampak sosial dari kebijakan tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan afirmatif yang diterapkan tidak justru menghasilkan reproduksi kesenjangan sosial baru dalam sistem pendidikan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dampak kebijakan Sekolah Rakyat terhadap kesenjangan sosial dalam sistem pendidikan di Kota Surabaya dengan menggunakan perspektif pembangunan berkelanjutan dalam kerangka SDGs.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Ketimpangan Pendidikan dan Tantangan Mobilitas Sosial

Ketimpangan pendidikan merupakan kondisi di mana individu atau kelompok masyarakat memiliki akses yang tidak merata terhadap sumber daya pendidikan, baik dalam hal kualitas fasilitas, tenaga pengajar, maupun kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Ketimpangan ini sering kali berkaitan erat dengan latar belakang sosial ekonomi keluarga, di mana siswa dari keluarga berpenghasilan rendah cenderung menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang lebih mampu (Blanden et al., 2022). Dalam perspektif pembangunan sosial, pendidikan dipandang sebagai instrumen penting dalam menciptakan mobilitas sosial vertikal

atau social elevator, yaitu proses di mana individu dapat meningkatkan status sosial dan ekonominya melalui peningkatan kapasitas pendidikan. Namun, distribusi sumber daya pendidikan yang tidak merata antar sekolah berpotensi menghambat fungsi tersebut. Sekolah yang berada di lingkungan sosial ekonomi lebih tinggi umumnya memiliki fasilitas pendidikan yang lebih baik serta akses akademik yang lebih luas, sehingga menghasilkan kesenjangan capaian pendidikan antar kelompok masyarakat. Ketimpangan pendidikan yang berlangsung secara terus-menerus berpotensi memperkuat stratifikasi sosial dalam masyarakat. Ketika akses terhadap pendidikan berkualitas hanya dimiliki oleh kelompok tertentu, maka pendidikan tidak lagi berfungsi sebagai alat mobilitas sosial, melainkan justru menjadi mekanisme yang mempertahankan ketimpangan sosial antar generasi.

2. Kebijakan Afirmasi: Upaya Pemerataan dan Dilema Institusional

Untuk mengurangi ketimpangan pendidikan, pemerintah sering kali menerapkan kebijakan afirmatif yang bertujuan memberikan kesempatan lebih besar bagi kelompok masyarakat yang secara sosial dan ekonomi kurang beruntung. Kebijakan afirmatif dalam bidang pendidikan dapat diwujudkan melalui berbagai program, seperti pemberian bantuan pendidikan, beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu, serta penyediaan program pendidikan yang secara khusus ditujukan bagi kelompok masyarakat marginal. Dalam konteks Indonesia, kebijakan afirmatif menjadi bagian dari upaya negara untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan serta mengurangi kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat. Program pendidikan yang secara khusus ditujukan bagi kelompok kurang mampu, seperti Sekolah Rakyat, dapat dipandang sebagai salah satu bentuk intervensi kebijakan untuk memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga miskin. Namun demikian, implementasi kebijakan afirmatif juga menimbulkan dilema institusional. Di satu sisi, kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan akses pendidikan bagi kelompok marginal. Di sisi lain, pemisahan siswa berdasarkan latar belakang sosial ekonomi ke dalam institusi pendidikan tertentu berpotensi menimbulkan stigma sosial serta memperkuat pemisahan sosial dalam sistem pendidikan.

3. Segregasi Sosial dalam Sistem Pendidikan

Segregasi sosial dalam pendidikan merujuk pada kondisi ketika siswa dikelompokkan dalam institusi pendidikan yang berbeda berdasarkan karakteristik sosial tertentu, seperti status ekonomi, ras, atau latar belakang budaya. Segregasi ini dapat muncul sebagai akibat dari kebijakan pendidikan maupun dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa segregasi sekolah antara kelompok kaya dan miskin masih menjadi fenomena yang umum terjadi di berbagai negara. Konsentrasi siswa dari kelompok ekonomi rendah pada sekolah tertentu sering kali menyebabkan perbedaan kualitas pendidikan antar institusi karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah tersebut (Van de Werfhorst & Mijs, 2019). Selain berdampak pada kualitas pendidikan, segregasi sekolah juga dapat memengaruhi interaksi sosial antar kelompok masyarakat. Lingkungan pendidikan yang homogen secara sosial cenderung membatasi interaksi lintas kelas sosial. Padahal, interaksi tersebut penting untuk membangun modal sosial (social capital) yang dapat membantu individu memperluas jaringan sosial serta meningkatkan peluang mobilitas sosial di masa depan.

4. Teori Reproduksi Sosial dalam Pendidikan

Untuk memahami bagaimana sistem pendidikan dapat mempertahankan ketimpangan

sosial, salah satu pendekatan teoritis yang sering digunakan adalah teori reproduksi sosial yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu. Dalam teorinya, Bourdieu menjelaskan bahwa sistem pendidikan tidak selalu berfungsi sebagai alat mobilitas sosial, tetapi juga dapat mereproduksi struktur ketimpangan yang telah ada dalam masyarakat. Menurut Bourdieu, kelompok masyarakat yang memiliki modal ekonomi, sosial, dan budaya yang lebih besar cenderung memiliki keuntungan dalam sistem pendidikan. Mereka lebih mudah beradaptasi dengan norma, nilai, dan tuntutan akademik yang berlaku dalam institusi pendidikan. Sebaliknya, kelompok masyarakat dengan sumber daya terbatas sering kali mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan tersebut. Dalam konteks kebijakan pendidikan, teori reproduksi sosial membantu menjelaskan bagaimana kebijakan yang bertujuan memperluas akses pendidikan dapat menghasilkan dampak yang kompleks. Program pendidikan yang dirancang untuk membantu kelompok marginal berpotensi meningkatkan kesempatan belajar, namun pada saat yang sama juga dapat menciptakan pemisahan sosial yang secara tidak langsung memperkuat stratifikasi sosial dalam masyarakat.

5. Pendidikan dalam Perspektif SDGs

Dalam agenda pembangunan global, pendidikan dipandang sebagai salah satu instrumen utama dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Agenda Sustainable Development Goals menempatkan pendidikan sebagai salah satu tujuan utama pembangunan global melalui tujuan keempat yang menekankan pentingnya penyediaan pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata bagi seluruh masyarakat. Selain itu, tujuan kesepuluh dalam SDGs juga menekankan pentingnya pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi antar kelompok masyarakat. Kedua tujuan tersebut menunjukkan bahwa sistem pendidikan tidak hanya berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam menciptakan struktur sosial yang lebih adil dan inklusif. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan yang dirancang untuk memperluas akses pendidikan perlu mempertimbangkan tidak hanya aspek peningkatan partisipasi sekolah, tetapi juga dampak sosial yang mungkin muncul dari implementasi kebijakan tersebut, termasuk potensi munculnya segregasi sosial dalam sistem pendidikan.

6. Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas hubungan antara ketimpangan pendidikan, kebijakan pemerataan pendidikan, serta dampaknya terhadap struktur sosial masyarakat. Blanden et al. (2022) menunjukkan bahwa ketimpangan akses pendidikan memiliki hubungan erat dengan mobilitas sosial antar generasi, di mana individu dari keluarga dengan latar belakang ekonomi rendah cenderung menghadapi hambatan dalam meningkatkan status sosialnya. Penelitian lain yang dilakukan oleh Van de Werfhorst dan Mijs (2019) menemukan bahwa segregasi sekolah berdasarkan latar belakang sosial ekonomi dapat memperkuat ketimpangan pendidikan karena sekolah yang didominasi oleh kelompok ekonomi rendah sering kali memiliki sumber daya pendidikan yang lebih terbatas. Meskipun berbagai penelitian telah membahas ketimpangan pendidikan dan segregasi sekolah, kajian yang secara khusus menyoroti potensi dampak sosial dari kebijakan pendidikan yang berbasis institusi khusus bagi kelompok masyarakat miskin masih relatif terbatas, terutama dalam konteks implementasinya di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk menganalisis bagaimana kebijakan Sekolah Rakyat berpotensi memengaruhi dinamika kesenjangan sosial dalam sistem pendidikan, khususnya dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*literature review*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis fenomena kebijakan pendidikan secara mendalam melalui interpretasi terhadap berbagai sumber literatur yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi konsep, teori, serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan ketimpangan pendidikan, kebijakan afirmatif dalam pendidikan, serta potensi segregasi sosial dalam sistem pendidikan. Metode studi literatur digunakan untuk mengkaji berbagai penelitian, laporan kebijakan, serta dokumen akademik yang berkaitan dengan topik penelitian. Melalui metode ini, peneliti dapat mengidentifikasi berbagai perspektif teoritis serta temuan empiris yang relevan untuk memahami potensi implikasi sosial dari kebijakan pendidikan yang ditujukan bagi kelompok masyarakat tertentu, seperti program Sekolah Rakyat. Penggunaan metode studi literatur dalam penelitian ini dipilih karena fenomena yang dikaji merupakan isu kebijakan publik yang masih berkembang dan memerlukan pemahaman konseptual yang komprehensif. Dengan menganalisis berbagai sumber literatur yang ada, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai potensi dampak kebijakan pendidikan terhadap dinamika kesenjangan sosial dalam sistem pendidikan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder tersebut meliputi artikel jurnal ilmiah, buku akademik, laporan penelitian, dokumen kebijakan pemerintah, serta publikasi resmi dari lembaga nasional maupun internasional yang membahas isu pendidikan dan ketimpangan sosial. Sumber data dalam penelitian ini dipilih berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian, yaitu ketimpangan pendidikan, kebijakan afirmatif dalam pendidikan, segregasi pendidikan, serta peran pendidikan dalam pembangunan berkelanjutan. Beberapa sumber literatur yang digunakan berasal dari jurnal ilmiah yang terindeks secara akademik serta publikasi lembaga internasional yang membahas isu pemerataan pendidikan dalam konteks pembangunan global.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis terhadap berbagai sumber akademik yang relevan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mencari dan mengidentifikasi literatur yang berkaitan dengan topik penelitian melalui basis data jurnal ilmiah, buku akademik, serta dokumen kebijakan yang membahas isu ketimpangan pendidikan dan kebijakan pemerataan pendidikan. Literatur yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan beberapa kriteria, antara lain relevansi dengan topik penelitian, kredibilitas sumber, serta keterkaitan dengan konsep teoritis yang digunakan dalam penelitian. Proses seleksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa sumber data yang digunakan memiliki kualitas akademik yang memadai dan dapat mendukung analisis penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Teknik ini digunakan untuk mengkaji dan menginterpretasikan berbagai informasi yang diperoleh dari sumber literatur secara sistematis guna memahami hubungan antara konsep-konsep yang berkaitan dengan topik penelitian. Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, peneliti mengidentifikasi konsep dan teori utama yang berkaitan dengan ketimpangan pendidikan, kebijakan afirmatif, serta segregasi sosial dalam pendidikan. Kedua, peneliti melakukan pengelompokan dan pengorganisasian literatur berdasarkan tema-tema yang relevan dengan fokus penelitian. Ketiga, peneliti melakukan interpretasi terhadap berbagai temuan dalam literatur untuk mengidentifikasi hubungan antara kebijakan pendidikan dan potensi implikasi sosial yang dapat muncul dari implementasi kebijakan tersebut. Melalui proses analisis tersebut, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman konseptual mengenai bagaimana kebijakan

pendidikan yang bertujuan meningkatkan pemerataan akses pendidikan dapat memengaruhi dinamika kesenjangan sosial dalam sistem pendidikan, khususnya dalam konteks kebijakan Sekolah Rakyat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketimpangan pendidikan merupakan fenomena struktural yang tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana peningkatan kapasitas individu, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi peluang sosial. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan berkualitas masih sangat dipengaruhi oleh latar belakang keluarga, terutama dalam hal ekonomi dan pendidikan orang tua. Hal ini sejalan dengan temuan Blanden, Doepke, dan Stuhler (2022) yang menegaskan bahwa ketimpangan pendidikan memiliki keterkaitan erat dengan mobilitas sosial, di mana anak-anak dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah cenderung memiliki capaian pendidikan yang lebih rendah dibandingkan kelompok yang lebih mampu. Ketimpangan tersebut tidak hanya terjadi pada aspek akses, tetapi juga pada kualitas pendidikan yang diterima peserta didik. Perbedaan fasilitas, kualitas tenaga pengajar, serta lingkungan belajar menyebabkan terjadinya kesenjangan capaian akademik antar kelompok sosial. Blanden et al. (2022) menunjukkan bahwa kesenjangan capaian pendidikan berdasarkan latar belakang sosial ekonomi sudah terlihat sejak usia sekolah menengah dan berkontribusi pada reproduksi ketimpangan sosial antar generasi. Dalam kondisi ini, pendidikan yang seharusnya menjadi sarana mobilitas sosial justru berpotensi mempertahankan stratifikasi sosial yang telah ada.

Dalam konteks Indonesia, ketimpangan pendidikan juga tidak dapat dilepaskan dari faktor historis. Sistem pendidikan pada masa kolonial dirancang secara diskriminatif dan hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu, terutama kalangan elit dan pihak yang mendukung kepentingan kolonial. Pendidikan pada masa tersebut lebih berorientasi pada penyediaan tenaga kerja administratif dibandingkan dengan upaya mencerdaskan masyarakat secara luas. Warisan historis ini kemudian membentuk pola stratifikasi dalam akses pendidikan yang masih terasa hingga saat ini (Nasution, 2016.). Oleh karena itu, ketimpangan pendidikan di Indonesia merupakan hasil akumulasi dari faktor struktural dan historis yang belum sepenuhnya teratasi. Dari perspektif kelembagaan, struktur sistem pendidikan juga berperan dalam memperkuat ketimpangan. Diferensiasi sekolah berdasarkan kualitas dan status sosial menciptakan kesenjangan dalam distribusi sumber daya pendidikan. Van de Werfhorst dan Mijs (2010) menjelaskan bahwa sistem pendidikan yang tersegmentasi berpotensi memperbesar kesenjangan capaian belajar karena adanya pemisahan siswa ke dalam institusi dengan kualitas yang berbeda. Dalam praktiknya, kondisi ini tercermin pada adanya dikotomi antara sekolah unggulan dan sekolah reguler yang masih kuat dalam persepsi masyarakat Indonesia (Karmila et al., 2020.).

Sebagai upaya untuk mengurangi ketimpangan tersebut, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan afirmatif, salah satunya melalui sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Secara konseptual, kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan akses pendidikan, menghapus stigma sekolah favorit, serta mendistribusikan peserta didik secara lebih merata (Gutiérrez et al., 2020). Namun demikian, implementasi kebijakan zonasi belum sepenuhnya efektif. Meskipun mampu meningkatkan akses berbasis wilayah, kebijakan ini belum berhasil menghilangkan persepsi masyarakat terhadap kualitas sekolah, sehingga stigma sekolah favorit masih tetap bertahan (Karmila et al., 2020.). Selain itu, sistem zonasi juga berpotensi menimbulkan ketimpangan baru, terutama bagi siswa berprestasi yang memiliki keterbatasan akses terhadap sekolah berkualitas di wilayah tempat tinggalnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerataan yang tidak diiringi dengan peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh justru dapat menciptakan bentuk ketidakadilan baru dalam sistem

.....

pendidikan (Gutiérrez et al., 2020). Dalam konteks tersebut, pemerintah kemudian menghadirkan program Sekolah Rakyat sebagai bentuk kebijakan afirmatif yang ditujukan bagi kelompok masyarakat kurang mampu. Program ini bertujuan untuk memperluas akses pendidikan serta mengurangi angka putus sekolah. Secara konseptual, kebijakan ini memiliki potensi untuk meningkatkan partisipasi pendidikan bagi kelompok marginal. Namun demikian, jika dianalisis lebih dalam, kebijakan ini juga menimbulkan dilema dalam sistem pendidikan.

Selain menimbulkan potensi segregasi sosial, kebijakan Sekolah Rakyat yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 juga menimbulkan persoalan dalam tata kelola kelembagaan, karena sektor pendidikan secara normatif berada di bawah kewenangan kementerian yang menangani urusan pendidikan, yaitu Kemendikdasmen. Keterlibatan Kementerian Sosial dalam penyelenggaraan pendidikan formal berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan fragmentasi kebijakan, serta mengurangi efektivitas implementasi akibat kurangnya integrasi dengan standar nasional pendidikan, kurikulum, dan sistem evaluasi. Selain itu, penempatan Sekolah Rakyat dalam kerangka kebijakan sosial berisiko memperkuat persepsi bahwa pendidikan bagi kelompok miskin merupakan bentuk bantuan sosial, bukan sebagai hak dasar yang harus dipenuhi secara setara dalam sistem pendidikan inklusif. Dengan demikian, pengaturan ini menunjukkan adanya inkonsistensi tata kelola yang dapat memicu dualisme kelembagaan dan memperkuat pemisahan struktural dalam sistem pendidikan, sehingga diperlukan integrasi kebijakan lintas sektor agar program afirmatif tetap selaras dengan kerangka pendidikan nasional.

Dari perspektif ketimpangan pendidikan, Sekolah Rakyat berpotensi menciptakan segregasi sosial karena adanya pemisahan institusional berdasarkan latar belakang ekonomi. Raabe (2019) menekankan bahwa lingkungan sosial sekolah memiliki pengaruh signifikan terhadap capaian pendidikan siswa. Lingkungan yang homogen secara sosial dapat membatasi interaksi lintas kelas sosial serta mengurangi akses terhadap modal sosial yang penting bagi perkembangan individu. Dalam konteks ini, siswa yang berada dalam Sekolah Rakyat berpotensi mengalami keterbatasan dalam membangun jaringan sosial yang lebih luas. Selain itu, segregasi dalam pendidikan juga berimplikasi pada munculnya stigma sosial. Pemisahan sekolah berdasarkan kategori ekonomi dapat memperkuat labelisasi terhadap siswa dari kelompok kurang mampu. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memengaruhi kepercayaan diri siswa serta peluang mereka dalam melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja. Dengan kata lain, kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan justru berpotensi mereproduksi ketimpangan dalam bentuk yang berbeda.

Jika dikaitkan dengan teori reproduksi sosial, kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan tidak selalu berfungsi sebagai alat mobilitas sosial, tetapi juga dapat menjadi mekanisme yang mempertahankan struktur sosial yang ada. Ketika kelompok masyarakat miskin terkonsentrasi dalam institusi pendidikan tertentu dengan keterbatasan sumber daya, maka peluang mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan menjadi semakin terbatas. Dengan demikian, kebijakan Sekolah Rakyat memiliki karakter yang ambivalen. Di satu sisi, kebijakan ini mampu meningkatkan akses pendidikan bagi kelompok marginal. Namun di sisi lain, terdapat potensi munculnya segregasi sosial yang dapat memperkuat ketimpangan dalam sistem pendidikan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan ini perlu dirancang secara hati-hati dengan memperhatikan aspek integrasi sosial, pemerataan kualitas pendidikan, serta penguatan modal sosial siswa. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, temuan ini menunjukkan bahwa pencapaian tujuan pendidikan (SDGs 4) tidak dapat dipisahkan dari upaya pengurangan kesenjangan sosial (SDGs 10). Pendidikan yang inklusif tidak hanya berarti memperluas akses, tetapi juga memastikan bahwa sistem pendidikan tidak menciptakan pemisahan sosial yang baru. Oleh karena itu, kebijakan

.....

pendidikan perlu dirancang secara holistik dengan mempertimbangkan dimensi struktural, sosial, dan historis secara simultan agar mampu menciptakan keadilan pendidikan yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendidikan merupakan persoalan struktural yang dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi, historis, dan kelembagaan dalam sistem pendidikan. Pendidikan yang seharusnya menjadi sarana mobilitas sosial dalam praktiknya masih cenderung mereproduksi ketimpangan, terutama karena adanya perbedaan akses dan kualitas yang dipengaruhi oleh latar belakang keluarga (Blanden et al., 2022). Berbagai kebijakan afirmatif seperti sistem zonasi menunjukkan upaya pemerintah dalam menciptakan pemerataan pendidikan, namun implementasinya belum sepenuhnya efektif karena masih adanya kesenjangan kualitas serta kuatnya persepsi masyarakat terhadap dikotomi sekolah.

Dalam konteks tersebut, program Sekolah Rakyat hadir sebagai alternatif kebijakan untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat kurang mampu. Meskipun memiliki tujuan yang progresif, kebijakan ini juga menimbulkan dilema karena berpotensi menciptakan segregasi sosial, memperkuat stigma, serta membatasi interaksi lintas kelas sosial. Selain itu, pengaturan Sekolah Rakyat melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 menunjukkan adanya persoalan dalam tata kelola kelembagaan, yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan fragmentasi kebijakan dalam sistem pendidikan. Dengan demikian, kebijakan ini memiliki karakter ambivalen, yaitu sebagai solusi dalam meningkatkan akses sekaligus berpotensi memperkuat ketimpangan dalam bentuk baru jika tidak dirancang secara tepat.

Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah memastikan integrasi kebijakan Sekolah Rakyat ke dalam sistem pendidikan nasional dengan memperkuat koordinasi antar kementerian, khususnya dengan kementerian yang menangani sektor pendidikan. Implementasi kebijakan perlu diarahkan pada pendekatan yang inklusif dengan menghindari pemisahan sosial yang kaku, serta diiringi dengan pemerataan kualitas pendidikan melalui penyediaan fasilitas, tenaga pendidik, dan sumber daya yang memadai. Selain itu, evaluasi kebijakan secara berkala perlu dilakukan untuk menilai efektivitas program serta dampaknya terhadap kesenjangan sosial. Pendekatan kebijakan yang holistik dan lintas sektor juga diperlukan agar upaya pemerataan pendidikan tidak hanya meningkatkan akses, tetapi juga mampu menciptakan sistem pendidikan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Gutiérrez, G., et al. (2020). *[Educational Interventions for Nursing Students to Develop Communication Skills with Patients: A Systematic Review]*.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Sekolah Rakyat*.
- Blanden, J., Doepke, M., & Stuhler, J. (2022). *Educational inequality*. National Bureau of Economic Research.
- Van de Werfhorst, H. G., & Mijs, J. J. B. (2010). Achievement inequality and the institutional structure of educational systems: A comparative perspective. *Annual Review of Sociology*, 36, 407–428.
- Raabe, I. J. (2019). *Social inequality and education outcomes*.
- Nasution, S. (2016). *Strategi pendidikan Belanda pada masa kolonial di Indonesia*. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sumatera Utara.
- Karmila, M., et al. (2020). *Analisis Kebijakan Pendidikan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru*